2025

RENCANA AKSI

Perubahan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA AKSI PERUBAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tujuan : Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB Subseckor Perikanan	%												
	Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%												
		Produksi Perikanan	ton												
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	NTN												
	1 **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	31.23										Bidang Perikanan Tangkap	
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	30.00											
		Persentase Pelabuhan Perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	89.47											
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	451818.72											
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp.	960232411.00											
	1 **Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil**	**Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah**	**Klp**	**114**	**88**	**92**	**98**	**209**							
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampaidengan 12 Mil	**Unit**	**437**	**1,008**	**1,055**	**1,130**	**2,471**							
	1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan12 Mil	Dok	1	-	2	-	2	Menyusun TOR dan KAK	100					
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
									Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	60	40				
									Merencanakan, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	30	70				
									Melakukan Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja		60	40			
									Pelaksanaan pengadaan barang			40	60		
									Memonitoring Pekerjaan dan Pelaporan		30	70			
									Melakukan Penyerahan barang kepada kelompok penerima			40	60		
									Menyusun laporan kegiatan	25	25	25	25		
	2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan12 Mil	Unit	1	-	2,025	1,100	2,425	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
									Melakukan survey dan identifikasi lokasi	100					
									Merencanakan, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	50					
									Melakukan Persiapan lelang pekerjaan		50	75	100		
									Melelang perkerjaan		100				
									Melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan		50	75	100		
									Memonitoring Pekerjaan dan Pelaporan		50	75	100		
									Melakukan Serah Terima Pekerjaan		50	75	100		
									Menyusun laporan kegiatan				100		
	3 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	unit	9	8	**30**	**30**	**46**	Menyusun TOR dan KAK	100					
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
									Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	70	30				
									Melakukan verifikasi dan koordinasi lokasi di Kab/Kota	70	30				
									Merencanakan, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	50	50				
									Merencanakan DED, Spesifikasi pekerjaan dan		100				
									Monitoring Pekerjaan dan Pelaporan		100				
									Menyusun laporan kegiatan		100				

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2 Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa,dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	**Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawadan genangan air lainyya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi**	**Unit**	**75**	**-**	**-**	**-**	**6**						Bidang Perikanan Tangkap	
		Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah	**Klp**	**10**	**-**	**-**	**-**	**6**							
	1 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	3	-	-	-	5	Menyusun TOR dan KAK	100					
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				Bidang Perikanan Tangkap	
									Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	50	50				
									Melakukan verifikasi dan koordinasi lokasi di Kab/Kota	60	40				
									Merencanakan, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	30	70				
									Melakukan Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja		60	40			
									Pelaksanaan pengadaan barang			60	40		
									Memonitoring Pekerjaan dan Pelaporan		30	70			
									Melakukan Penyerahan barang kepada kelompok penerima			50	50		
									Menyusun laporan kegiatan		50		50		
	3 Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	**Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**rekomendasi**	**15**	**3**	**3**	**3**	**4**						Bidang Perikanan Tangkap	
	1 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Persentase	20	3	3	3	4	Menyusun TOR dan KAK	100					
									Penyusunan laporan kegiatan				100		
	4 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampaidengan 10 Gt Di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Airlainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Dok**	**144**	**-**	**125**	**-**	**-**						Bidang Perikanan Tangkap	
	1 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dok	500	-	125	-	-	Menyusun TOR dan KAK	100					
									Penyusunan laporan hasil kegiatan				100		
	5 Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan pelabuhan Perikanan Provinsi	**Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola**	**Pelabuhan**	**19**	**-**	**-**	**-**	**9**						CDK Wil.1 dan 2	
		Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan PelabuhanPerikanan Provinsi	**Pelabuhan**	**4**	**-**	**6**	**-**	**-**							

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan	4	-	6	-	-	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Perikanan Tangkap	
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
									Melakukan survey dan identifikasi lokasi	40	60				
									Penyusunan laporan hasil kegiatan		100				
	2 penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang tersedia	unit	24	3	2	4	1	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
									Merencanakan DED, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	100				CDK Wil.1 dan 2	
									Melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan		100	100	100		
									Memonitoring Pekerjaan dan Pelaporan		25	50	100		
									Menyusun laporan kegiatan				100		
	3 Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	layanan	19	3	-	-	19	Kelengkapan dokumen kapal yg masih berlaku sebagai syarat penerbitan SPB	25	50	75	100	CDK Wil.1 dan 2	
									Pemeriksaan Dokumen Kapal perikanan oleh syahbandar perikanan	25	50	75	100		
									Penerbitan SPB (surat persetujuan berlayar) oleh syahbandar perikanan	25	50	75	100		
	2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Rp.	22,187,160,000										Bidang Budidaya	
		Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	4417925,7											
		Persentase ketersediaan benur berkualitas	%	90											
	1 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi**	**Laporan**	**12**	**-**	**-**	**-**	**10**							
	1 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi	rekomendasi	14	-	-	-	5							
				5	-	-	-	5	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
									Proses Barang dan Jasa (LPSE)	100	100	100	100		

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									serah terima benih dan pakan		100	100	100		
									pelaksanaan operasional budidaya KJA		33	67	100		
									Monitoring dan penyusun laporan kegiatan		33	67	100		
2	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut**	**Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**Unit**	**102**	**334**	**135**	**465**	**-**							
		Jumlah pembudidaya di kawasan konservasi dan laut yang dibina dan dipantau	**Org**	**50**	**-**	**-**	**20**	**20**							
	1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	unit	100	334	134	465	-	Penyusunan KAK dan RAB	100					
									Penyusunan Petunjuk Teknis	100				Bidang Budidaya	
									Verifikasi Berkas CPCL	100					
									Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	100					
									Melakukan verifikasi dan koordinasi lokasi di Kab/Kota	100					
									Proses barang dan jasa (LPSE)	100					
									Melakukan Penyerahan barang kepada kelompok penerima	30	30	30	10		
									Monitoring Pekerjaan dan Pelaporan				100		
									Laporan hasil kegiatan				100		
	2 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	unit	2	-	1	-	-	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100					
									Proses barang dan jasa (LPSE)	100				PBAPL	
									Serah terima benih dan pakan		100				
									Pelaksanaan operasional budidaya KJA		100				
									Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan		100				
	3 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut danLintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	1	70	70	70	74	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				Bidang Budidaya	
									Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	100					
									Pengadaan bahan uji		100				
									Monitoring lingkungan tambak dan residu		100				
									Menyusun laporan kegiatan		100				
	4 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	org	50	-	-	20	20	Melakukan persiapan			50	50	Bidang Budidaya	
									Melakukan Perencanaan Pembinaan dan Pemantauan Ikan di Kawasan konservasi				100		
									Laporan hasil kegiatan				100		
	5 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	-	-	20	20	Melakukan persiapan			50	50	Bidang Budidaya	
									Melakukan Perencanaan Pembinaan dan Pemantauan Ikan di Kawasan konservasi				100		
									Laporan hasil kegiatan				100		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat	**Jumlah areal pengelolaan pembudidaya ikan**	**Hektar**	**100**	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**							
		Jumlah produksi nener / benur yang berkualitas	**Ekor**	**19,800,000**											
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan di perairan darat	**Unit**	**4**	**258**	**200**	**100**	**292**							
	1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	-	-	2	-	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				PBAPL	
									Melakukan verifikasi dan koordinasi lokasi di Kab/Kota	100					
									Proses barang dan jasa (LPSE)	100					
									Memonitoring perkembangan budidaya			100			
									Menyusun laporan kegiatan			100			
	2 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	unit	3	258	200	101	292	Penyusunan KAK dan RAB	100				PBAPL	
									Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
									Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	100					
									Verifikasi Berkas CPCL	100					
									Verifikasi Lapangan CPCL		100				
									Proses barang dan jasa (LPSE)		100				
									Pelaksanaan Penyerahan paket bantuan		40	40	20		

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Monitoring Pekerjaan dan Pelaporan				100		
									Laporan hasil kegiatan				100		
3	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase pengujian mutu produk perikanan	%	100	97,985,000	97,985,000	97,985,000	97,985,000							
		Nilai Produksi ikan konsumsi yang dipasarkan	Rp.	411,540,000	1,538	1,538	1,538	1,538							
		Produksi olahan ikan	Ton	6,273.44	25	25	25	25							
	1 **Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasilperikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas DaerahKabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan**	**Rekomendasi**	**80**	**20**	**20**	**20**	**20**							
	1 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan PengolahanHasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran HasilPerikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	80	20	20	20	20	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				Bidang Budidaya dan Daya Saing	
									Identifikasi kelompok penerima paket	100					
									Preses Barang dan Jasa (LPSE)		100				
									Mendistribukan dan serah terima sarana inovasi pengolahan				100		
									Menyusun laporan kegiatan				100		
	2 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan PengolahanHasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dok	1	-	-	-	1	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				Bidang Budidaya dan Daya Saing	
									Proses Barang dan Jasa (LPSE) bahan pengujian	100					
									serah terima bahan pengujian		100				
									Pelaksanaan pelayanan pengujian laboratorium	25	50	75	100		
									Melakukan persiapan dan pelaksanaan pameran	100					
									melakukan persiapan dan pelaksanaan pertemuan difersifikasi hasil perikanan		100				
									pemeliharaan alat laboratorium		100				
									penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan				100		
	2 **Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usahapengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar**	**Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdaya saing**	**Unit Usaha**	**70**	**30**	**30**	**30**	**30**							
		Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkanpembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	**Unit Usaha**	**117**	**25**	**25**	**25**	**25**							
	1 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman	Kegiatan	5	-	-	50	30	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Budidaya dan Daya Saing	

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing							Persiapan lelang pekerjaan	25	25	25	25		
									Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan	25	25	25	25		
									Penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
	2 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya	Kegiatan	5	50	50	50	50	Menyusun TOR dan KAK	100				BPMPP	
									Persiapan lelang pekerjaan	25	25	25	25		
									Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan	25	25	25	25		
									Penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
	3 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahanikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan**	**Laporan**	**2**	**-**	**-**	**1**	**1**							
	1 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku UsahaPengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku UsahaPengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dok	1	-	-	1	-	penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan	-	-	100	-	Bidang Budidaya dan Daya Saing	
	2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	Sistem informasi	1	-	-	-	1	penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan	-	-	-	100	Bidang Budidaya dan Daya Saing	
	Tujuan : Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	potensi penurunan emisi GRK (juta ton CO2) sektor perikanan	Juta Ton CO2Eq												
	11 **Sasaran 11**: Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	%												
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%												
		Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing	%												
	4 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah produksi garam rakyat	Ton	6,000.00	204,148	204,148	204,148	204,148							
		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	%	78.44	14.22	14.22	14.22	14.22							
		Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	822,559.65	1,250	1,250	1,250	1,250							

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah Luas kawasan konservasi yang direhabilitasi**	**Ha**	**70**	15.25	15.25	15.25	15.25							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dangas bumi	**Unit**	**14**	-	-	-	14							
	1 Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulaupulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dok	1	10	22	10	5	Melakukan persiapan kegiatan	50	50			Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
									Pengumpulan bahan capaian kinerja dari unit kerja		100				
									Menerima bahan verifikasi			100			
									Laporan hasil kegiatan			50	50		
	2 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	578,435.53	-	238,094	9,166	-	Menyusun TOR, KAK dan Spesifikasi Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		100			Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
									Proses barang dan jasa (LPSE)		100				
									Melakukan persiapan kegiatan		100				
									Laporan hasil kegiatan			100			
	3 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	77	23.40	29	15	12	Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	100				CDK Selayar, Ajataparang,Bosowasi, Luwu Raya, Maminasata, Pangkep, Wilsel	
									Melakukan survey dan identifikasi lokasi	50	50				
									Perencanaan sarana inovasi teknologi, Spesifikasi pekerjaan dan RAB	50	50				
									Proses barang dan jasa (LPSE)	50	50				
									Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan		50	50			
									Melakukan Serah Terima Pekerjaan		50	25	25		
									Laporan hasil kegiatan				100		
	4 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait MitigasiBencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Org	175	-	-	-	100	Menyusun TOR dan KAK			100		Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
									Pemilihan tempat pertemuan fullboard				100		
									Laporan hasil kegiatan				100		
	2 **Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawah 12 Mil Diluar Minyak Dan Gas Bumi**	**Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas BumiYang Diterbitkan**	**Rekomendasi**	**12**											
	1 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dok	4	1	1	1	1	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan			**50**	**50**	Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	2 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dok	4											
	3 **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan**	**Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan**	**Org**	**70**	230	230	230	230							

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pulau-Pulau Kecil	**Produksi garam rakyat**	**Ton**	**105,320**											
	1 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	org	70	20	560	430	60	Penyusunan KAK dan RAB	**50**	**50**			Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
									Proses barang dan jasa (LPSE)		**100**				

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Melakukan persiapan kegiatan		50	50			
									Monitoring Pekerjaan dan Pelaporan			100			
									Laporan hasil kegiatan				100		
	2 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisirdan Pulau-Pulau Keci	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan KelembagaanMasyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	klp	10	1	5	3	1	Belanja ATK		50	50		Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
									Pelaksanaan Perjalanan Dinas		40	50	10		
	3 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses IlmuPengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	klp	5	1	1	1	7	Penyusunan KAK dan RAB		100			Bidang Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
									Proses barang dan jasa (LPSE)		100				
									Pelaksanaan pertemuan		50	50			
									Laporan hasil kegiatan				100		
	61 **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	%	100										Bidang Pengawasan	
	1 Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	**Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)**	**klp**	**13**	**-**	**-**	**-**	**13**							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12Mil	**Dok**	**1,054**	**356**	**356**	**356**	**356**							
	1 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	568	1	6	3	3	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan	
									Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25		
									Melakukan Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja	25	25	25	25		
									Belanja ATK		50	50			
									Pelaksanaan pertemuan		100				
									Pelaksanaan Perjalanan Dinas	20	30	25	25		
									Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	20	30	25	25		
									Laporan hasil kegiatan				100		
	2 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	1,054											
	3 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	12	65	155	160	90	Menyusun TOR dan KAK	100				CDK Selayar, Ajatapareng,Bosowasi, Luwu Raya, Maminasata, Pangkep, Wilsel	
									Melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan	100					
									Menginventarisasi data dan lokasi IUU Fishing	25	25	25	25		
									Koordinasi dengan DKP Prov, Polairud dan Pokmaswas terkait kegiatan pengawasan dan pemantauan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan	25	25	25	25		
									Menyusun daftar lokasi IUU Fishing dan pelayanan rekomendasi izin usaha	25	25	25	25		
									Menyusun daftar rencana patroli lokasi IUU Fishing dan biota laut yang dilindungi	25	25	25	25		
									Melakukan Patroli/ Pengawasa	25	25	25	25		
									Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
	4 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Klp Masyarakat	13	2	3	2	3	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan	
									Penyusunan Petunjuk Teknis	100					

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25		
									Melakukan Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja	25	25	25	25		
									Belanja ATK	100					
									Pelaksanaan Perjalanan Dinas	25	25	25	25		
									Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	25	25	25	25		
									Laporan hasil kegiatan				100		
	5 Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Forum	1	2	4	1	30	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan	
									Penyusunan Petunjuk Teknis	100					

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25		
									Melakukan Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja	25	25	25	25		
									Belanja ATK				100		
									Pelaksanaan pertemuan				100		
									Pelaksanaan Perjalanan Dinas	35	50	15			
									Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	35	50	15			
									Laporan hasil kegiatan				100		
	2 Pengawasan Sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan lintas kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	**Jumlah dokumen hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa,dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) DaerahProvinsi**	**Dok**	**26**	**7**	**7**	**7**	**5**							
	1 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	70	1	-	3	1	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan	
									Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25		
									Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	25	25	25	25		
									Belanja ATK			100			
									Pelaksanaan Perjalanan Dinas	50		50			
									Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	50		50			
									Laporan hasil kegiatan				100		
	2 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	115	-	2	3	-	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan	
									Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25		
									Melakukan koordinasi lokasi dengan Kab/Kota	25	25	25	25		
									Belanja ATK			100			
									Pelaksanaan Perjalanan Dinas		50	50			
									Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas		50	50			
									Laporan hasil kegiatan				100		
	3 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil PerikananLintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	70	2	3	2	1	Menyusun TOR dan KAK	100				Bidang Pengawasan	
									Penyusunan Petunjuk Teknis	100					
									Melakukan persiapan kegiatan dan penjadwalan	25	25	25	25		
									Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja	25	25	25	25		
									Belanja ATK	100					
									Pelaksanaan Perjalanan Dinas	30	30	30	10		
									Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	30	30	30	10		
									Laporan hasil kegiatan				100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Huruf/angka	99.6	25	25	25	25							
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Huruf/angka	97.0	-	-	-	100.42							
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	100.0	20	20	20	20.96							
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**9**	**3**	**3**	**3**	**3**						**Sub Bagian Program**	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	-	2	-	-	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100				Sub Bagian Program	

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Pelaksanaan Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan sinkronisasi perencanaan	100					
									Pengumpulan Bahan perencanaan	100					
									Penyusunan dokumen Renstra, stunting dan kemiskinan	100					
									Penyusunan renja pokok 2025 dan GBS		100				
									Penyusunan renja perubahan 2024			100			
									Penyusunan laporan hasil kegiatan		100				
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	-	-	-	1	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100				Sub Bagian Program	
									menyusun standar satuan harga dan bagan satuan standar	50	50				
									mengumpulkan dan analisa usulan hasil pokok pikir dan musrembang		100				
									penyusunan dokumen rancangan awal RKA berdasarkan KUAPPAS		100				
									penyusunan RKA berdasarkan R APBD		100				
									Penyesuain RKA berdasarkan evaluasi			100			
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-	-	1	-	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)		100			Sub Bagian Program	
									menyusun standar satuan harga dan bagan satuan standar		100				
									analisa capaian kinerja sampai dengan triwulan 2 dan laporan prognosis keuangan		100				
									penyusunan dokumen rancangan awal RKA perubahan berdasarkan KUAPPAS perubahan			100			
									Penyusunan RKA perubahan berdasarkan R APBD perubahan			100			
									Penyesuain RKA berdasarkan evaluasi				100		
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100				Sub Bagian Program	
									penandatangan dan pengesahan DPA 2024	100					
									validasi tingkat kepala OPD, tingkat BUD DPA 2025				100		
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	-	-	-	1	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100				Sub Bagian Program	
									Validasi tingkat kepala OPD, tingkat BUD DPA perubahan 2023				100		
									Penandatangan dan pengesahan DPA perubahan 2024				100		
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	11	5	2	2	2	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100				Sub Bagian Program	
									pengumpulann data capaian kinerja	50	100	100	100		
									koordinasi dalam rangka penyusunan laporan kinerja	25	50	75	100		
									penyusunan laporan capaian kinerja	80	100	100	100		
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2	-	-	3	Melakukan persiapan kegiatan (Menyusun TOR dan KAK)	100				Sub Bagian Program	
									pengumpulan data evaluasi kinerja	17	-	-	100		
									koordinasi dalam rangka penyusunan laporan kinerja	25	50	75	100		

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									penyusunan laporan capaian kinerja	67	67	75	100		
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Laporan**	**45**											
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org	189	181	-	-	-	Menyusun TOR dan KAK	100				Sub Bagian Keuangan	
									Melakukan analisis dan perhitungan gaji dan tunjangan ASN	100					
									Melakukan penginputan data gaji dan tunjangan ASN pada aplikasi	25	25	25	25		
									Cetak laporan gaji dan tunjangan	25	25	25	25		
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji / Verrfikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dok	12	3	3	3	3	Melakukan persiapan	100				Sub Bagian Keuangan	
									Menerima bahan verifikasi	10	30	30	30		
									Melakukan analisis dan verifikasi keuangan SKPD sesuai aturan yang berlaku	10	30	30	30		
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dok	12	3	3	3	3	Melakukan persiapan	100				Sub Bagian Keuangan	
									Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
									Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	-	-	-	1	Melakukan persiapan	100				Sub Bagian Keuangan	
									Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100					
									Pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir				100		
									Penyusunan laporan keuangan akhir				100		
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dok	2	1	-	-	1	Melakukan persiapan	100				Sub Bagian Keuangan	
									Penyusunan laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		50		50		
									Laporan hasil kegiatan		50		50		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	18	4	5	4	5	Melakukan persiapan	100				Sub Bagian Keuangan	
									Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	100					
									Pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	25	25	25	25		
									Menyusun laporan kegiatan	25	25	25	25		
3	**Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah**	**Unit**	**53**											
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	dok	1	1	-	-	-	Menyusun TOR, KAK dan Spesifikasi penyediaan Barang Cetakan Kantor		100			UKH	
									Melakukan persiapan pengadaan		100				
									Mengusulkan pengadaan barang		100				
									Pelaksanaan pengadaan barang		100				
									Menerima barang Cetakan Kantor		100				
									Mendistribusikan Barang Cetakan Kantor		100				
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	dok	1	-	-	-	1	Menyusun TOR, KAK dan Spsifikasi pengadaan belanja modal pagar		100			UKH	
									Melakukan persiapan pengadaan		100				
									Mengusulkan pengadaan barang		100				
									Pelaksanaan pengadaan barang		100				
									Menerima barang Pengadaan belanja modal pagar		100				

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Mendistribusikan Pengadaan belanja modal pagar		100			UKH	
	3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	1	1	-	-	Melakukan persiapan	100					
									Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	100					
									Laporan hasil kegiatan	50	50				
	4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah Pendapatan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah**	**Rp.**	**1,986,874,004**											
	1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	dok	1	1	-	-	-	Melakukan persiapan	100				Sub Bagian Keuangan	
									Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
									Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum**	**Unit**	**120**											
		Jumlah Tamu Yang difasilitasi	**Orang**	**2,574**											
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	7	-	-	-	Menyusun TOR, KAK dan Spesifikasi Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Melakukan persiapan pengadaan	100					
									Mengusulkan pengadaan barang	100					
									Pelaksanaan pengadaan barang	100					
									Menerima barang perlengkapan dan peralatan kantor	100					
									Mendistribusikan peralatan dan perlengkapan kantor	100					
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	30	32	14	2	1	Menyusun TOR, KAK dan Spesifikasi Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
									Melakukan persiapan pengadaan	100					
									Mengusulkan pengadaan barang	100					
									Pelaksanaan pengadaan barang	100					
									Menerima barang perlengkapan dan peralatan kantor	50	50				
									Mendistribusikan peralatan dan perlengkapan kantor	50	50				
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	16	12	2	3	-	Melakukan persiapan	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
									Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	100					
									Menyusun rencana pemeliharaan	100					
									Menyusun TOR, KAK dan Spsifikasi penyediaan Peralatan rumah tangga	100					
									Menerima barang Peralatan rumah tangga	50	50				
									Mendistribusikan Peralatan rumah tangga	50	50				
									Laporan hasil kegiatan	50	50				
	4 Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	10	9	10	3	3	Menyusun TOR, KAK dan Spesifikasi penyediaan Barang Cetakan Kantor	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
									Melakukan persiapan pengadaan	100					
									Mengusulkan pengadaan barang	100					
									Pelaksanaan pengadaan barang	100					
									Menerima barang Cetakan Kantor	25	25	25	25		
									Mendistribusikan Barang Cetakan Kantor	25	25	25	25		
	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	26	26	26	26	Melakukan persiapan	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
									Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
									Proses barang dan jasa (LPSE)	25	25	25	25		
									Menyusun laporan kegiatan	25	25	25	25		
									Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	33	37	36	30	Melakukan persiapan	25	50	75	100	UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
									Menyusun rencana kebutuhan	100					
									Menyiapakan administrasi dan surat tugas	100					
									Pelaksanaan Perjalanan Dinas	25	25	25	25		
									Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas	25	25	25	25		
	7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausaaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	1	-	-	-	1	Melakukan persiapan	100				UKH	
									Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	100					
									Laporan hasil kegiatan	100					
	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Unit**	**11**	**9**	**-**	**-**	**-**							
	1 pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	paket	17	7	-	-	-	Menyusun TOR, KAK dan Spsifikasi pengadaan mebel	100				UKH, CDK	
									Melakukan persiapan pengadaan	100					

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Mengusulkan pengadaan barang	100					
									Pelaksanaan pengadaan barang	100					
									Menerima barang Pengadaan mebel	100					
									Mendistribusikan Pengadaan mebel	100					
	2 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	1	-	-	-	Melakukan persiapan	100				UKH	
									Proses barang dan jasa (LPSE)		100				
									Laporan hasil kegiatan		90	10			
	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**163**											
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	3	3	3	3	Melakukan analisis dan perhitungan biaya tagihan telepon, air dan listrik	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
			144						Melakukan penginputan biaya tagihan telepon, air dan listrik	25	25	25	25		
									Membuat Laporan biaya rekening listrik dan air bersih	25	25	25	25		
									Menyelesaikan biaya rekening listrik dan air bersih	25	25	25	25		
	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	3	3	3	3	Melakukan persiapan	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
									Penyusunan rencana pemeliharaan	100					
									Monitoring Pekerjaan dan Pelaporan	25	25	25	25		
									Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	139	3	3	3	3	Mengumpulkan berkas Jasa Pelayanan Umum Kantor	100					
									Menempatkan tenaga di masing-masing unit kerja	100					
									Memonitoring pekerjaan dan pelaporan	25	25	25	25		
									Menyusun Laporan Kegiatan	25	25	25	25		
									Melakukan pembayaran honorarium jasa pelayanan Umum Kantor	25	25	25	25		
	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Unit**	**42**	**9**	**9**	**9**	**9**							
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara danDibayarkan Pajaknya	Unit	2	18	-	-	-	Melakukan persiapan	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
									Penyusunan rencana pemeliharaan	100					

No	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Rencana Aksi	Target Kinerja Sampai dengan Triwulan				Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Melakukan pemeliharaan secara berkala sesuai daftar pemeliharaan barang	25	25	25	25		
									Penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajakdan Perizinannya	Unit	14	13	13	12	-	Melakukan persiapan	100				UKH, Cabang Dinas Kelautan, UPT	
									Menyusun rencana pemeliharaan	100					
									melakukan pemeliharaan secara berkala sesuai daftar pemeliharaan barang suku cadang Kendaraan Dinas operasional	20	30	50			
									Laporan hasil kegiatan				100		
	3 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	2	-	1	-	-	Melakukan persiapan	100				UKH	
									Proses barang dan jasa (LPSE)		100				
									Laporan hasil kegiatan		90	10			
	4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bagunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	1	4	3	2	Melakukan persiapan	100				UKH	
									Proses barang dan jasa (LPSE)	100					
									Monitoring dan penyusunan laporan kegiatan	25	25	25	25		
									Penyusunan KAK dan RAB	25	25	25	25		
									Laporan hasil kegiatan	25	25	25	25		
	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3	1	-	-	Penyusunan rencana pemeliharaan	100				UKH	
									Persiapan administrasi dan koordinasi mitra kerja	100					
									Melakukan pemeliharaan secara berkala sesuai daftar pemeliharaan barang		50	50			
									Berita acara hasil pemeliharaan		50	50			

Makassar, November 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan

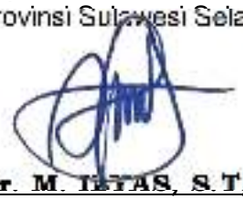
Dr. M. ILYAS, ST., M.S.Sc
Nip. 19700606 199603 1

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas Evalausi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. Dokumen ini disusun untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, dan sebagai dasar evaluasi dan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2025.

Dengan tersusunnya Evaluasi Rencana Aksi ini pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dapat berkomitmen dan konsisten terhadap perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Makassar, November 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan



Ir. M. IQTAS, S.T, M.Sc

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		***ii***
Daftar Isi		***iii***
BAB I.	**PENDAHULUAN**	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	1
1.3.	Maksud dan Tujuan	2
1.4.	Ruang Lingkup	3
1.5.	Struktur Organisasi	3
BAB II.	**TELAAHAN VISI MISI KEPALA DAERAH**	
2.1.	Visi dan Misi	6
BAB III.	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**	
3.1.	Tujuan dan Sasaran	8
3.2.	Program dan Kegiatan	9
3.3.	Evaluasi Rencana Aksi	11
BAB IV.	**PENUTUP**	16

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Aksi sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2022 – 2026, Renja Tahun 2025 dan untuk anggaran disusun berdasarkan DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 , serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Rencana Aksi juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan setiap Program / Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan pada Tahun 2025. Dengan berdasarkan pada Rencana Aksi yang tersusun secara baik dan sistematis, dapat meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Aksi merupakan proses penyusunan yang menjabarkan dari Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Aksi dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam Tahun 2023. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja, kegiatan - kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 adalah target Kinerja yang ditetapkan dari capaian indikator kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Tersedianya dokumen Rencana Aksi dalam melaksanakan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2025.
2. Menyajikan informasi pelaksanaan program kegiatan per triwulan dan bahan evaluasi dalam pencapaian kinerja.

Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi atas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah :

1. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi ;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public ;
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Pemerintah;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah;
4. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

6. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 meliputi Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator serta Realisasi Anggaran dan Kinerja.

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 maka Rancangan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

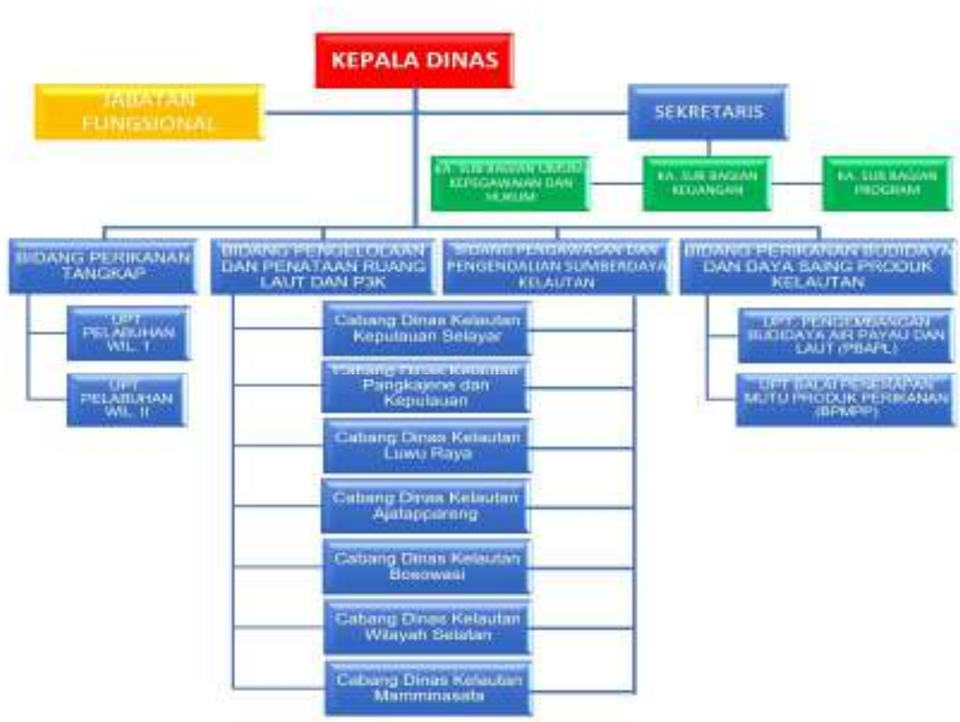
1. Kepala Dinas (Eselon II);
2. Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian (Terdiri Eselon III dan Eselon IV) ;
   Terdiri dari :
   a. Kasubag Program
   b. Kasubag Umum
   c. Kasubag Keuangan
3. Bidang Teknis sebanyak 4 Unit (hanya Eselon III) ;
   Terdiri dari :
   a. Bidang Perikanan Tangkap
   b. Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
   c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
   d. Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Perikanan
4. UPT sebanyak 4 unit dengan membawahi 1 Bagian Tata Usaha dan 2 Unit Seksi (Terdiri Eselon III dan Eselon IV) ;
   a. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1, terdiri dari :
      - Kasubag Tata Usaha
      - Kasie Tata Kelola Pelabuhan
      - Kasie Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
   b. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 2
      - Kasubag Tata Usaha
      - Kasie Tata Kelola Pelabuhan
      - Kasie Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
   c. UPT BPAPL Bojo
      - Kasubag Tata Usaha
      - Kasie Produksi
      - Kasie Pelayanan Teknologi dan Kesehatan Lingkungan
   d. UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan :
      - Kasubag Tata Usaha

- Kasie Pengembangan Produk
- Kasie Pengujian

5. Kepala CDK sebanyak 7 unit dengan membawahi 1 Bagian Tata Usaha dan 2 Unit Seksi (Terdiri Eselon III dan Eselon IV), terdiri dari :
   a. Kasubag Tata Usaha
   b. Kasie Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan
   c. Kasie Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Tabel 1. Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat / Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol.	Jumlah Pejabat Struktural	Fungsional
ASN : 189	S3 : 5	IV/e : 0	Es. II : 1	7
Non ASN : 147	S2 : 52	IV/d : 0	Es. III : 16	
	S1 : 108	IV/c : 0	Es. IV : 32	
	Sarj. Muda : 6	IV/b : 9		
	SLTA : 17	IV/a : 28		
	SLTP : 0	III/d : 88		
	SD : 1	III/c : 22		
		III/b : 14		
		III/a : 12		
		II/d : 9		
		II/c : 4		
		II/b : 1		
		II/a : 0		
		I/d : 1		
		I/c : 1		
		I/b : 0		
		I/a : 0		
Jumlah PNS	P**NS = 189**			



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 2. Bagan Alur Penyusunan Rencana Aksi

BAB II. TELAAHAN VISI MISI KEPALA DAERAH

2.1. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan maka untuk mengevaluasi Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan maka dapat diketahui dengan melihat indicator-indikator yang terkait dengan Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah **Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter** untuk mewujudkan Visi maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 2 Misi yaitu :

a. Misi 1 : **Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif.**
b. Misi 5 : **Meningkatkan produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan**

Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter, dengan Misi yang diamanahkan adalah Misi ke - 1 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi Melayani dan Inovatif dan Misi ke – 5 yaitu Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan. Dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran di atas tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Hasil identifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan tentang factor-factor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatanakan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan factor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan maka Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan Program Prioritas dan Program Pendukung pada Tahun 2025 yang diwujudkan melalui Laporan Evaluasi Rencana Aksi.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut di atas, ditetapkan tujuan yang ingin dicapaioleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Tujuan, Sasaran dan Program

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	Baseline	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -			
			2019	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	**Tujuan :** Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publiK	Indeks Reformasi Birokrasi OPD	75,00	75,30	75,45	75,60	62,27
1.1	**Sasaran :** Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,61	86,01	86,21	86,41	86,88
		Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	95	98	98,5	99	86,96
		Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	79,32
a.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik (%)	100	100.00	100.00	100.00	100.42
		Persentase penurunan temuan	7.41	8.00	8.70	9.52	10.53

		berdasarkan LHP (%)					

3.2. Program dan Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan sebanyak 6 Program yang terdiri 27 Kegiatan Pada Tahun 2025 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
   Pada program ini terdapat 9 Kegiatan yaitu :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
   Pada program ini terdapat 3 Kegiatan yaitu :
   a. Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi.
   b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.
   c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   Pada program ini terdapat 5 Kegiatan yaitu :
   a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil
   b. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa,dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
   c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
   d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampaidengan 10 Gt Di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Airlainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
   e. Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan pelabuhan Perikanan Provinsi

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

   Pada Program ini terdapat 3 Kegiatan yaitu :

   a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
   b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
   c. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

   Pada Program ini terdapat 2 Kegiatan :

   a. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.
   b. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

   Pada Program ini terdapat 3 Kegiatan yaitu :

   a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
   b. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
   c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

3.3. Evaluasi Rencana Aksi

Rencana Aksi Tahun 2025 dapat dijelaskan melalui uraian di bawah ini :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Tahun 2025 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp36.061.806.950,,-. Sasaran program meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator program yaitu : (1) Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti, (2) Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah, (3) Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah.

pada Sub Kegiatan yang ada di program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, Sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pada Tahun 2025 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp15.403.256.800,- Sasaran program Meningkatnya Kelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam Kelautan dan Perikanan, dengan indikator program yaitu : (1) Cakupan Jumlah sarana dan prasarana mendukung produksi perikanan, (2) Perluasan Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan, (3) Jumlah Produksi Garam Rakyat.

Pada Sub Kegiatan yang ada di Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan pulau-pulau Kecil yaitu : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat,

Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat, Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Pada Tahun 2025 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.851.255.867**,-** dan Sasaran program Meningkatnya Kelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam Kelautan dan Perikanan, dengan indikator program yaitu : (1) Cakupan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Sub kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yaitu : Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil, Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil, Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya, Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya.

d. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pada Tahun 2025 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 23.032.785.775,-. Sasaran program Meningkatnya Produksi Perikanan dengan menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi, dengan indikator program yaitu : (1) Cakupan Bina Kelompok Nelayan, (2) Jumlah produksi perikanan tangkap, (3) Nilai produksi perikanan Tangkap (4) Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional, (5) Persentase produksi perikanan kelompok nelayan.

Sub Kegiatan pada Bidang Perikanan Tangkap Yaitu : Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT, Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT,

Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT, Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada Tahun 2025 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.841.571.459,- dengan sasaran program Meningkatnya Produksi Perikanan dengan menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi, dengan indikator program yaitu : (1) Jumlah Produksi perikanan budidaya, (2) Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya.

Berdasarkan tabel di atas, sub kegiatan dari bidang budidaya yaitu : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut, Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pada Tahun 2025 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 671.704.400,-. Sasaran program Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dengan indikator program yaitu : (1) Produksi Olahan Ikan, (2) Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan.

Sub kegiatan pada pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yaitu : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

BAB IV. P E N U T U P

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/ kegiatan yang tercantum pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung setiap pelaksanaan program/ kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/ hambatan yang timbul. Dengan tersusunnya laporan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Kegiatan yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada input, proses dan output. Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Laporan Evaluasi Rencana Aksi ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.